

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektifitas Pajak Daerah menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan dan berada dalam kategori sangat efektif, sesuai dengan kriteria standar efektifitas Munir (2004: 48), dengan tingkat rata-rata efektifitas penerimaan sebesar 118,88% tergolong >100%.
2. Hasil analisis efektifitas Retribusi Daerah menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi dimana penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2014 dan 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 97,25% dan tahun 2015 sebesar 99,89%. Namun demikian penerimaan Retribusi Daerah berada dalam kategori sangat efektif sesuai dengan kriteria standar efektifitas Munir (2004: 48), dengan tingkat rata-rata efektifitas penerimaan sebesar 100,23% tergolong >100%.
3. Hasil analisis efisiensi Pajak Daerah menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan dan berada dalam kategori sangat efisien, sesuai

dengan kriteria standar efisiensi Munir (2004: 48), dengan tingkat rata-rata efisiensi penerimaan sebesar 5,53% tergolong <60%.

4. Hasil analisis efisiensi Retribusi Daerah menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan Retribusi Daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi dimana efisiensi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2013 sebesar 4,06%, tahun 2014 sebesar 4,60% dan tahun 2015 sebesar 4,57% Walau mengalami fluktuasi tingkat efisiensi penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2013-2015 dikategorikan sangat efisien sesuai dengan kriteria standar efisiensi Munir (2004: 48) dengan rata-rata efisiensi penerimaan sebesar 4,41% tergolong <60%.
5. Hasil analisis pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 menurun dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 37,37% dan turun menjadi 31,91% pada tahun 2015.
6. Hasil analisis pertumbuhan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 4,90% dan naik menjadi 29,58% pada tahun 2015.
7. Hasil analisis kemampuan Pajak dan Retribusi Daerah dalam membiayai Belanja Daerah menunjukkan bahwa kemampuan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan dimana persentase Kemampuan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun

2013 sebesar 7,08%, tahun 2015 sebesar 8,83% dan pada tahun 2015 sebesar 10,54%.

8. Berdasarkan semua hasil analisis diatas, ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Kupang dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2013-2015 dapat dikatakan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD), antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang diharapkan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah agar sesuai dengan potensi-potensi Pajak maupun Retribusi daerah yang ada di Kota Kupang. sehingga dalam upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai realisasi penerimaan yang maksimum dan sesuai dengan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah Kota Kupang diharapkan dalam penetapan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah agar dapat juga melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya itu sendiri sehingga biaya yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan tingkat realisasi penerimaan pendapatan yang diterima dan dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga  
Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM  
YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munir, Dasril, Henry A. Djuanda dan Hessel N. S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan  
dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta.
- Halim, A, dan M, S, Kusufi, 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ke-4,  
Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba  
Empat
- UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU Nomor 34 Tahun 2000  
dan telah diperbaharui kembali dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 23  
Tahun 2014, tentang Pemerinthana Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 12  
Tahun 2008, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah.